



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN BULAN  
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) DI  
KELURAHAN SAMPANGAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR  
KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Eva Nur Hidayah

NIM. 3301416044

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**

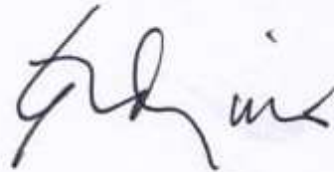
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 09 April 2020

Pembimbing Skripsi I



Drs. Tijan, M.Si.  
NIP. 196211201987021001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.  
NIP. 196211201987021001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 April 2020

Penguji I



Drs. Setiajid, M.Si.  
NIP. 196006231989011001

Penguji II



Martien Herna S, S.Sos, M.Si.  
NIP. 197303312005012001

Penguji III



Drs. Tijan, M.Si.  
NIP. 196211201987021001



## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 09 April 2020



Eva Nur Hidayah  
NIM. 3301416044

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Jika ingin yang terbaik, lakukan yang terbaik.”

### **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Hadi Suwigyo dan Siti Aminah. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus dan ikhlas, limpahan doa yang tak berkesudahan, serta dukungan atas segala yang tercapai saat ini. Maafkan putrimu ini yang belum bisa berbakti dan memberikan kebahagiaan sebagaimana Engkau membahagiakanku.
2. Saudara-saudara tersayangku Ria Ristania, Khender Purnomo, Kakak Iparku Andik Pramulyo, dan Keponakanku Adinda Beldha Andita Pramulyo. Kalian adalah semangatku untuk terus berjuang menuntut ilmu dan menyelesaikan studi strata satu ini, serta memberikan warna dalam melangkah menggapai cita.
3. Untuk teman, sahabat, dan partner terbaik Fajar Sujudi yang tiada hentinya selalu mendampingi dan memberikan semangat untuk berprestasi dan sukses mencapai masa depan yang lebih baik.
4. Sahabatku Siti Nur Solekah yang selalu ada disaat senang maupun susah, Siti Rodiah, Etik Nur Hidayah, Ayunda Dea Sanandita, dan Nurul Khasanah yang selalu ada dan menemaniku dalam menyelesaikan karya ini.

5. Teman-teman sebimbangan Intan Nur Cahya, Risista Ratri Rahayu, Putri Fitriani, Pita Oktapiyani yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan karya ini.
6. Kakak-kakak tingkat yang baik Ratna Aprilia, Nuzulul Fika Aulia, Riski Ashari, dan Dyong Wahyuni yang membantu untuk mereview dan memberikan saran-saran agar karya ini selesai dengan baik.
7. Keluarga Jurusan Politik dan Kewarganegaraan terutama Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2016, yang telah berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.
8. Segenap keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial tahun 2018 yang sudah memberikan pengalaman organisasi yang begitu berharga.
9. Sahabat-sahabatku KKN di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, mudah mudahan momentum bersama bisa menjadi kenangan indah di suatu hari nanti.
10. Sahabat-sahabat PPL SMA Negeri 11 Semarang yang sudah bersama-sama berjuang selama 45 hari untuk belajar menjadi guru.
11. Almamater tercinta Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

## SARI

**Hidayah, Eva Nur. 2020.** *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Tijan, M.Si. 143 Halaman.

**Kata Kunci: Kelurahan Sampangan, partisipasi masyarakat, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan gotong royong pembangunan suatu wilayah, selain untuk melestarikan nilai gotong royong juga menyelaraskan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dan pemerintah. Termasuk kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat khususnya di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian meliputi masyarakat Kelurahan Sampangan, Lurah Sampangan, Ketua LPMK Sampangan, dan tokoh masyarakat Kelurahan Sampangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan tahapan pengumpulan data dari lapangan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari fakta yang didapatkan di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan sudah baik. Terdapat beberapa alur yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Alur tersebut yaitu 1) diawali dengan adanya pengorganisasian tim pelaksana yang dipegang oleh LPMK; 2) persiapan yang diwujudkan dengan adanya Musrenbangkel; 3) pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh masing-masing tingkatan kegiatan, baik itu kegiatan pada tingkatan RT, RW, maupun tingkat Kelurahan; 4) pembinaan pengendalian pelaksanaan kegiatan dari pemerintah kelurahan yaitu dibina langsung oleh Lurah dan LPMK pada saat Rakor (Rapat Koordinasi); 5) terdapat monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilakukan tidak secara khusus. Pada saat tidak mengikuti lomba, pembinaan, monitoring, evaluasi,

dan pelaporan tidak dilakukan secara berjenjang di tingkat kecamatan maupun kota. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan sudah baik dengan memberikan sumbangsih pikiran. Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan sudah sangat baik, dengan antusias masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang, dan alat kerja. Pada tahap pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan sangat baik dengan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti untuk merawat hasil. Pada tahap evaluasi, partisipasi masyarakat juga sudah baik karena masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan penilaiannya termasuk memberikan saran dan kritik. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya yaitu, keteladanan dari pengurus, komunikasi, sanksi sosial, usia, dan kerukunan/kebersamaan. Sementara upaya untuk membangkitkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Sampangan adalah dengan mensosialisasikan program; menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan; Pemerintah Kelurahan Sampangan sebagai fasilitator memfasilitasi dana; serta memotivasi dan mengarahkan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan RT, RW atau dalam pertemuan kelurahan untuk selalu berpartisipasi aktif.

Saran, *pertama*, Pemerintah Kelurahan Sampangan lebih berkoordinasi dengan Pemerintah Kota terkait pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Sampangan dengan memberdayakan elemen-elemen kemasyarakatan yang ada seperti, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dll untuk mengajak masyarakat lebih aktif dalam berpartisipasi. Selain itu, Pemerintah Kelurahan Sampangan dapat menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan persuasif/personal agar sebagian masyarakat yang belum aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dapat berpartisipasi dengan maksimal. *Kedua*, Pemerintah Kota Semarang sebaiknya tetap memberikan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepada semua kelurahan yang ada di Kota Semarang meskipun kelurahan tersebut tidak mengikuti lomba. Sehingga, masyarakat akan lebih terpacu untuk meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan gotong royong.



## ***ABSTRACT***

**Hidayah, Eva Nur. 2020.** *Community Participation in the Community Mutual Cooperation Month Service in the Sampangan Village, Gajahmungkur Sub-District, Semarang City.* Final Project. Department of Politics and Civics, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang. Supervisor Drs. Tijan, M.Si. 143 pages.

**Keywords: Sampangan Village, community participation, Community Mutual Cooperation Month Service**

Community participation is one of the important indicators of mutual cooperation activity in a region development, besides to conserve the value of mutual cooperation it's also harmonize with the community and government goals. Including the Community Participation in the Community Mutual Cooperation Service Month in its implementation requires an active participation from the community, especially in the Sampangan Village, Gajahmungkur District, Semarang City. The aims of this study are to describe the activity of Community Mutual Cooperation Service Month and the community participation in the Community Mutual Cooperation Service Month in the Sampangan Village, Gajahmungkur District, Semarang City, starting from planning, implementation, and evaluation.

This study uses a qualitative approach. The objects of the study are the Sampangan village community, the Sampangan village chief, the Sampangan LPMK chairperson, and the Sampangan village personage. The data collection methods used in this study are interview, documentation, and observation. While the data analysis technique used is an interactive model with stages of data collection from the field, data reduction, data presentation, and drawing conclusions from facts obtained in the field. Data analysis in qualitative research is carried out simultaneously with the data collection process.

The results showed that the implementation of the Community Mutual Cooperation Service Month in Sampangan Village was good. There are several channels that are in accordance with Permendagri No. 42 of 2005 Regarding the Guidelines for the Implementation of the Community Mutual Cooperation Service Month. The plot is 1) begins with the organization of the implementation team held by the LPMK; 2) preparations are manifested with the existence of the Musrenbagkel; 3) the implementation of social, economic, socio-cultural and religious activities, and the environment are adjusted to the time determined by each level of activity, both activities at the RT, RW, and Village level; 4) fostering the control of the implementation of activities of the village government that is directly fostered by the chief of the village and LPMK during the Coordination Meeting; 5) there is monitoring evaluation and reporting which is not done specifically. When not participating in the competition, coaching, monitoring, evaluating, and reporting are not carried out in stages at the sub-district or city level. Community participation at

the planning stage is good enough by contributing thoughts. Community participation at the implementation stage can be said to be very good, with enthusiasm of the community participating in activities that have been planned and manifested in the form of labor, money, and working tools. At the results utilization stage, community participation can also be said to be very good by actively participating in community service activities to care for results. At the evaluation stage, community participation is also quite good because the community can easily convey their assessments including giving suggestions and criticisms. Factors that influence community participation include, for example, management, communication, social sanctions, age, and harmony / togetherness. While the effort to generate community participation in the Sampangan Village is to socialize the program; adjust activities to the needs of the community and involve the community in decision making; The Sampangan Village Government as a facilitator facilitates funds; and motivating and directing the community to always actively participate meetings in RT, RW or village stage.

Suggestions, first, the Sampangan Village Government is more coordinating with the City Government related to coaching, monitoring, evaluating, and reporting the Community Mutual Cooperation Service Month (BBGRM) activity and further increasing the participation of the Sampangan Village community by empowering existing social elements such as RT, RW, PKK, Youth Organization, etc. to invite the community to be more active in participating. In addition, the Sampangan Village Government can deliver a persuasive / personal approach to the community so that the people who have not been active in the planning, implementation, utilization, and evaluation activities of the Community Mutual Cooperation Service Month (BBGRM) can participate maximally. Second, the Semarang City Government should continue to provide guidance, monitoring, evaluation, and reporting to all villages in Semarang city even though the village does not participate in the competition. Thus, the community will be more motivated to increase their participation in mutual cooperation activity.

## **PRAKATA**

Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata satu dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, bantuan, pertolongan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu melalui untaian kata ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman. M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di perguruan tinggi.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mengelola akademik, kemahasiswaan dan sarana prasarana perkuliahan.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Bapak Dr. Agustinus Sugeng Priyanto, M.Si. dosen wali yang membimbing selama masa studi saya.

5. Bapak Drs. Tijan, M.Si., dosen pembimbing yang dengan kesabaran dan ketekunannya telah mengarahkan, memberi saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak Supono, Lurah Sampangan, Bapak Hadi Santoso, Ketua LPMK Sampangan, Bapak H. Rukan, Ketua RW 01, Bapak Budi Susatyo, Ketua RW 03, Bapak Suparyo, Ketua RW 05, Bapak Salman, Ketua RT 06 RW 01, Bapak Murdoko, Tokoh Agama, Ibu Tin Subekti, Sekretaris PKK, dan Mbak Nia Marheni, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sampangan yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan banyak informasi.
8. Masyarakat Kelurahan Sampangan yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis terkhusus untuk (Bapak Kusaedi, masyarakat RT 06 RW 01 dan Bapak Kuncar Asrianto, mewakili masyarakat RT 01 RW 05).
9. Semua pihak yang belum bisa penulis sebutkan di sini, atas segala perhatian, bantuan, dan kasih sayang.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak.

Semarang, 13 April 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN KELULUSAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SARI .....	vi
ABSTRACT .....	viii
PRAKATA .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Batasaan Istilah .....	10

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Deskripsi Teoretis .....	13
1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah .....	13
a. Pengertian Partisipasi Masyarakat .....	13
b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat .....	17
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat .....	21
d. Upaya Membangkitkan Partisipasi Masyarakat .....	26
2. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) .....	27
a. Pengertian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) .	27
b. Pengorganisasian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) .....	29
c. Bidang-Bidang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) .....	34

B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan .....	37
C. Kerangka Pikir .....	41

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Latar Penelitian .....	44
B. Fokus Penelitian .....	46
C. Sumber Data .....	48
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	49
1. Wawancara .....	50
2. Dokumentasi .....	51
3. Observasi .....	52
E. Uji Validitas Data .....	53
F. Teknik Analisis Data .....	55

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	61
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	61
2. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan .....	64
3. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan .....	88
B. Hasil Pembahasan .....	111
1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan.....	112
2. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan .....	120

### **BAB V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	137
B. Saran .....	139

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>141</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>144</b>
-----------------------	------------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Susunan Kepengurusan LPMK Sampangan .....	65
Gambar 4.2: Pelaksanaan Pra Musrenbangkel Sampangan .....	69
Gambar 4.3: Pos Kamling RT. 06 RW.01 .....	76
Gambar 4.4: Jadwal Jaga Malam RT.06 RW.01 .....	77
Gambar 4.5: Produk Pangan UKM “Bagorbu-Cah” .....	78
Gambar 4.6: Arak-arakan Hasil Pertanian .....	79
Gambar 4.7: Ruang Terbuka Hijau RW.05 .....	81
Gambar 4.8: Kondisi Ruang Terbuka Hijau .....	82
Gambar 4.9: Rapat Koordinasi (Rakor) RT dan RW .....	85
Gambar 4.10: Daftar Kegiatan Kemasyarakatan Warga RT.01 RW.03 .....	87
Gambar 4.11: Pelaksanaan Rapat Tingkat RW .....	90
Gambar 4.12: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pos Kamling .....	94
Gambar 4.13: Kerja Bakti Sebagai Bentuk Perawatan Hasil .....	97
Gambar 4.14: Evaluasi dalam Pertemuan Tingkat RW 05 .....	100
Gambar 4.15: Kehadiran Peserta Pra Musrenbangkel .....	102

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1: Kerangka Pikir .....	43
Bagan 3.1: Triangulasi Sumber (Sugiyono, 2015:243) .....	54
Bagan 3.2: Analisis Data Miles dan Huberman .....	59



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1: Daftar Nama Informan .....	49
Tabel 3.2: Daftar Nama Informan .....	50
Tabel 4.1: Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur .....	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara Indonesia, membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan dalam berperilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu praksis Pancasila dalam relasi sosial kehidupan bermasyarakat adalah nilai gotong royong. Gotong royong menjadi salah satu sistem nilai budaya khas Indonesia yang perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat kedudukan seseorang tetapi lebih melihat pada kebersamaan masyarakat untuk saling membantu dalam suatu kegiatan.

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya, cenderung hidup berkelompok. Terdapat aneka ragam kelompok yang beradaptasi dengan lingkungan, dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan hidup. Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrahnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Oleh

sebab itu di dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap bergotong royong dalam menyelesaikan segala permasalahan.

Gotong royong adalah salah satu aktivitas sosial yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Kegiatan gotong royong secara sederhana mempunyai arti kerja sama secara suka rela antar individu dan antar kelompok yang membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Aktivitas kerjasama yang demikian merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial (Nasution, 2009: 1).

Analisa semantik (dalam, Dewantara, 2017:49) menunjukkan bahwa gotong royong yang dimaksudkan Soekarno bisa dimaknai sebagai: bekerja bersama-sama, saling bantu, dan bahu-membahu untuk mencapai hasil yang didambakan. Gotong royong berasal dari paham “karyo” dan “gawe” bersama yang amat khas Indonesia. Gotong royong mencakup kerjasama, musyawarah untuk mufakat, dan rasa saling menghargai. Gotong royong bagi Soekarno menjadi sari pati dan ringkasan Pancasila itu sendiri. Analisa tersebut menunjukkan bahwa gotong royong merupakan bekerja tanpa pamrih yang mencakup banyak aspek dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Sebagai bagian dari etika sosial dan budaya, pentingnya menjaga nilai gotong royong ini dijelaskan secara eksplisit dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001 bahwa:

Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi.

Nilai gotong royong termasuk dalam budaya daerah yang harus tetap dilestarikan agar budaya bangsa Indonesia tidak hilang terenggut zaman.

Di era ini, perubahan sosial telah menyebabkan nilai-nilai lama yang selama ini menjadi pegangan dan acuan dalam relasi sosial berbasis pada semangat dan nilai-nilai gotong royong mulai menurun. Masuknya pengaruh budaya luar yang sangat individual saat ini, rasa kebersamaan dan gotong-royong semakin memudar, kepekaan sosial mulai berkurang, tegur sapa dan bercengkrama serta kesadaran saling membantu sudah mulai luntur.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagai salah satu upaya untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong pada masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan. Kegiatan ini

mengikutsertakan seluruh komponen bangsa termasuk unsur departemen, lembaga pemerintah non departemen. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 dilaksanakan dalam empat bidang utama yaitu, gotong royong dibidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan.

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup kelurahan, yang dimaksud kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Penetapan kelurahan sebagai perangkat pemerintahan daerah di bawah kecamatan dimaksud dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, sebagai dasar perkiraan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah, karena peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan.

Peran pemerintah dalam pembangunan saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik. Masyarakatlah

sebagai pelaku utama pembangunan, dimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi. Namun terkadang tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah tidak seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sangat penting, agar selaras antara tujuan yang ingin dicapai pemerintah dan tujuan yang diinginkan masyarakat. Terdapat tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat menurut Conyers (1992:154), *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti (2013) dengan judul Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah didapatkan beberapa temuan, diantaranya yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan di Kelurahan Karang Jati belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat di dalam perencanaan tersebut. Realisasi pembangunan itu sendiri dilaksanakan oleh pihak pemerintah setempat tanpa adanya swadaya dari masyarakat terutama dalam bentuk materi (dana), masyarakat hanya memberikan swadaya dalam bentuk tenaga. Hal tersebut memberikan bukti bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan wilayah dengan semangat gotong royong masih perlu mendapat perhatian yang lebih.

Salah satu kelurahan yang masih memegang erat nilai-nilai gotong royong dan menyelenggarakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah Kelurahan Sampangan. Sampangan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Sampangan berhasil memperoleh gelar juara satu pelaksana terbaik kategori gotong royong masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Penghargaan yang diperoleh Kelurahan Sampangan karena unggul dalam gotong royong dan pemberdayaan masyarakat baik secara administrasi maupun implementasi di lapangan.

Menurut hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, determinan yang paling mempengaruhi keberhasilan Kelurahan Sampangan menjuarai Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2018 adalah partisipasi yang dilakukan masyarakat untuk ikut berperan aktif secara sadar dalam mendukung pembangunan di Kelurahan Sampangan, sehingga aspirasi-

aspirasi masyarakat akan muncul sejak dini. Dengan adanya partisipasi masyarakat, akan mewujudkan pembangunan yang berupaya menggerakkan kondisi masyarakat secara keseluruhan untuk lebih baik. Partisipasi masyarakat yang aktif inilah akan membuat pencapaian pembangunan berhasil pada suatu daerah. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan kajian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Sampangan, sehingga dapat menjuarai Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2018.

Berangkat dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat judul penelitian **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) DI KELURAHAN SAMPANGAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG”**.

## **B. Rumusan masalah**

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan:

1. bagaimana pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang?



2. bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang?

### **C. Tujuan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi guna mengetahui, menjawab, dan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
2. partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

### **D. Manfaat**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian ini secara teoretis dan praktis diharapkan dapat memberikan analisis ilmiah dan mendalam tentang Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

### 1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis adalah kegunaan hasil penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (Rachman, 2011:199). Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan PPKn, khususnya mampu menambah khasanah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, dapat memberikan sumbangsih berupa konsep-konsep baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM).

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat penggunaannya (Rachman, 2011:199). Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut.

#### a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), sehingga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan gotong royong dan hasil kajian ini dapat menjadi *Best Practice* dalam bidang pembangunan.

b. Bagi Pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai penerapan gotong royong pada masyarakat kelurahan dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar mengajarkan semangat persatuan dalam kegiatan gotong royong bagi peserta didik di sekolah.

c. Bagi Aparatur Kelurahan Setempat

Bagi aparaturnya Kelurahan Sampangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dukungan pihak kelurahan kepada masyarakat untuk meningkatkan pembangunan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

d. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Bagi Pemerintah Kota Semarang, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah agar lebih mengencarkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai gotong royong.

## **E. Batasan istilah**

### **1. Partisipasi**

Keith Davis (dalam, Abdulkarim, 2007:56) partisipasi merupakan keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud partisipasi

dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat Kelurahan Sampangan mengikuti suatu kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi didasarkan rasa sukarela.

## **2. Masyarakat**

Koentjaraningrat (2015:118) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Adapun yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yaitu: seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti, Tim penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainnya.

## **3. Partisipasi Masyarakat**

Mubyarto (dalam, Huraerah, 2008:110) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Adapun yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam suatu kegiatan gotong royong mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

#### **4. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 mengatakan bahwa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh di bulan Mei yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan. Adapun yang dimaksud Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dalam penelitian ini adalah kegiatan gotong royong dalam 4 (empat) bidang yaitu bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama, serta bidang lingkungan yang dilaksanakan di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang dimulai dari kegiatan perencanaan pada bulan Januari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Deskripsi Teoretis**

##### **1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah**

###### **a. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Walgito (dalam, Nawawi, 2013:104) menjelaskan partisipasi merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri tiap-tiap individu yang di dalamnya terdapat proses penekanan terhadap stimulus yang diterima atau dirasakan oleh alat indera individu dan proses ini selalu berlangsung setiap saat, karena dalam partisipasi itu merupakan aktivitas yang terintergrasi, maka seluruh yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut.

Dwiningrum (2011:50) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan suatu kelompok dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Akadun (2011:186) memandang partisipasi sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan dengan mencurahkan tenaga, pikiran, dan material (dana) sesuai dengan harapan kegiatan tersebut. Berdasarkan pendapat para

ahli di atas, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan dengan sumbangsih berupa tenaga, pikiran dan material untuk mendorong pada suatu pencapaian tujuan kegiatan tersebut.

Abdulkarim (2007:56) menjelaskan bahwa partisipasi tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Dengan kata lain, partisipasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program kegiatan sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan pribadi. Seturut dengan Abdulkarim, Huraerah (2008:109) mengartikan partisipasi bukan hanya sekadar mengambil bagian atau keikutsertaan saja, tetapi lebih dari itu yaitu mengandung tiga gagasan pokok, yaitu keterlibatan mental dan emosi, dorongan untuk memberikan sumbangan, dan penerimaan tanggung jawab.

Partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan (*partnership*) dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila saling percaya dan saling pengertian antara perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat dapat dihidupkan. Kondisi yang saling percaya dan saling pengertian tidak tumbuh begitu saja, tetapi harus terdapat pandangan saling menolong, saling percaya, dan

jujur antara aparat dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas tertentu.

Isbandi (dalam, Deviyanti, 2013:382) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani suatu masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Seturut dengan Isbandi, Hajar, Dkk (2018:30) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi. Tidak jauh berbeda dengan Hajar, Corynata (2012:116) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses kegiatan yang dilakukan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentu strategi dan prioritas serta advokasi.

Dalam konteks perencanaan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf d) menjelaskan bahwa



partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Sedangkan kaitannya dengan proses pembangunan, Adhisasmita (dalam, Putra, 2018:12) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek.

Lebih lanjut Mardikanto, Dkk (2019:82) menjelaskan dalam konteks kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya. Sementara itu, Dwiningrum (2011:56) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan

pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal.

Dari definisi partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh para pakar di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian partisipasi masyarakat memiliki cakupan yang luas. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas ikut serta dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan suka rela, tetapi lebih luas daripada itu yaitu disertai dengan tanggung jawab baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

Partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat Kelurahan Sampangan mengikuti suatu kegiatan didasarkan atas rasa sukarela. Selain itu, agar partisipasi memiliki makna, maka harus disertai dengan rasa tanggung jawab dan ditunjang dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta agar dapat mencapai satu tujuan yang sama, sehingga proses partisipasi dapat terlaksana dengan baik., Dalam hal ini yang dimaksud adalah partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

#### **b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Dalam menunjang keberhasilan program pembangunan, partisipasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Cohen dan Uphoff (dalam,

Soetomo, 2008:12) menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk.

- 1) Partisipasi dalam tahap perencanaan yang dikonkretkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat penyusunan dan penetapan program pembangunan serta sejauh mana masyarakat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk gagasan, saran, kritik, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan yang menitikberatkan pada menggerakkan sumber daya, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program yang diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang, dan alat kerja.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil yaitu keikutsertaan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program yang telah direncanakan sebelumnya, diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung misalnya dengan ikut serta

dalam mengawasi serta menilai, seperti memberikan kritikan, saran, atau protes.

Selaras dengan Cohen dan Uphoff, Deviyanti (2013:382) menyebutkan bahwa ada 2 jenis bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi *representative*. Partisipasi *representative* dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dengan cara mewakilkan kewenangan kepada orang yang telah dipilihnya duduk dalam organisasi atau panitia.

Keith Davis (dalam, Sastropetro, 1998:16) menyebutkan bahwa, bentuk-bentuk partisipasi adalah sebagai berikut: 1) konsultasi dalam bentuk jasa; 2) sumbangan spontan berupa uang atau barang; 3) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga); 4) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komunitas (biasanya diputuskan oleh rapat komunitas, rapat desa yang menentukan anggarannya); 5) sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli

setempat; 6) aksi masa; 7) mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri; 8) membangun proyek komuniti yang bersifat otonomi.

Bentuk-bentuk partisipasi dalam kegiatan, pelaksanaannya tentu memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau partisipasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan. Proses peran serta atau partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk: 1) proses pengambilan keputusan; 2) menentukan kebutuhan yang diinginkan; dan 3) menunjukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai (Sastropetro, 1998:17).

Dalam konteks pembangunan, Ndraha (dalam, Putra, 2018:16) membagi partisipasi masyarakat dalam enam bentuk.

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, dan melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam artian menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam melaksanakan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan dari masyarakat sampai sejauh mana pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan memperhatikan pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu signifikan, karena hal tersebut memiliki arti dan maksud yang sama. Maksud dari pembagian partisipasi menurut Huraerah (2008:117) adalah untuk menunjukkan luasnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan seseorang apabila akan berpartisipasi. Dengan kata lain, untuk berpartisipasi sumbangan orang hendaknya jangan dilihat hanya dari jumlah tenaga dan harta benda yang diberikan. Karena kalau partisipasi dibatasi pada sumbangan tenaga dan harta benda saja, artinya dapat mereduksi esensi konsep dasar partisipasi tersebut.

### **c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Slamet (dalam, Chusnah, 2008) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian.

#### **1) Jenis Kelamin**

Partisipasi yang diberikan oleh seorang laki-laki akan berbeda dengan partisipasi yang diberikan oleh seorang perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk

dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban.

2) Usia

Dalam kehidupan masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.

3) Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi dalam berpartisipasi karena dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi.

4) Tingkat Penghasilan

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi.

5) Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan seseorang akan menentukan tingkat penghasilan dan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan

dalam berpartisipasi, misalnya menghadiri pertemuan-pertemuan atau rapat.

Billah (dalam, Huraerah, 2008:119-121) mengungkapkan bahwa setidaknya ada lima motif yang melandasi masyarakat dalam berpartisipasi.

#### 1) Motif Psikologi

Kepuasan pribadi, pencapaian prestasi, atau rasa telah mencapai sesuatu (*achievement*) dapat merupakan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan kegiatan, termasuk juga untuk berpartisipasi meskipun kegiatan atau partisipasinya itu tidak akan menghasilkan keuntungan (baik berupa uang atau materi).

#### 2) Motif Sosial

Ada dua sisi motif sosial, yakni untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindari dari terkena pengendalian sosial (*social control*). Orang akan dengan suka hati berpartisipasi dalam suatu kegiatan (pembangunan) manakala keikutsertaannya itu membawa dampak meningkatkan status sosialnya. Pada sisi negatif orang akan “terpaksa” berpartisipasi dalam suatu kegiatan (pembangunan) karena “takut” terkena sanksi sosial (tersisih atau dikucilkan oleh masyarakat). Motif semacam ini dikendalikan oleh norma-norma sosial yang masih kuat didalam masyarakat.



### 3) Motif Keagamaan

Motif keagamaan didasarkan pada kepercayaan yang ada diluar manusia (Tuhan, sesuatu yang gaib, atau supranatural). Agama sebagai ideologi sosial yang mempunyai berbagai macam fungsi bagi pemeluknya, yaitu fungsi-fungsi: inspiratif, normative, integrative, identifikatif, dan operatif atau motivatif. Melalui aktualisasi fungsi-fungsi itu, agama dapat meningkatkan peranannya didalam proses pembangunan, dan lebih dari itu agama dapat meningkatkan peran para pemeluknya dalam proses pembangunan.

### 4) Motif Ekonomi

Laba (profit) adalah motif ekonomi yang dapat dan seringkali efektif mendorong orang mengambil keputusan untuk ikut berpartisipasi didalam kegiatan (pembangunan). Dengan menggunakan tata nalar ekonomi, orang akan memutuskan berpartisipasi (dalam suatu kegiatan) manakala kegiatan-kegiatan itu dapat menghasilkan manfaat/keuntungan bagi dirinya atau bagi perusahaan/kelompoknya, setidaknya ia akan ikut berpartisipasi jika tidak akan memperoleh kerugian atau paling tidak kerugian yang diperoleh dari partisipasinya lebih kecil daripada kerugian yang dapat diderita karena tidak ikut berpartisipasi.

### 5) Motif Politik

Dasar utama motif politik ini adalah kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi seseorang atau golongan akan ditentukan oleh besar kecilnya kekuasaan yang dapat diperoleh dari partisipasinya di dalam berbagai kegiatan(pembangunan). Semakin besar kekuatan yang mungkin diperoleh dari keterlibatannya di dalam kegiatan (pembangunan), maka semakin kuat pula kemungkinan untuk ikut berpartisipasi.

Sementara itu, dalam konteks pembangunan wilayah Adhisasmita (dalam, Putra, 2018:20) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi masyarakat, yaitu:

- 1) komitmen anggota masyarakat terhadap pembangunan partisipatif adalah rasa kuat, rasa kebersamaan, kesadaran, dan keikhlasan anggota masyarakat yang tinggi;
- 2) sarana untuk menunjang pembangunan partisipatif (tenaga, dana, dan bahan);
- 3) program pembangunan kegiatan partisipatif adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan paparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah khususnya kelurahan dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keinginan, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat

penghasilan masyarakat, dan jenis kelamin. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat khususnya kelurahan adalah jenis kepemimpinan, kebijakan, dan komunikasi pemerintah daerah.

#### **d. Upaya Membangkitkan Partisipasi Masyarakat**

Upaya menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan dalam membangun masyarakat. Andulkarim (2007:58) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan melalui upaya berikut.

- 1) Menggunakan prinsip pertukaran dasar (*basic exchange principle*) yaitu melalui pendekatan timbal balik manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat. Artinya, semakin banyak manfaat yang diperoleh semakin banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan.
- 2) Memberikan bimbingan dan kepercayaan kepada masyarakat melalui lembaga masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial sehingga memotivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi.
- 3) Memberikan pemahaman bahwa kegiatan pembangunan harus bersifat dan berfungsi sebagai pendorong yang mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
- 4) Menggunakan rancangan pembangunan yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk terlibat langsung.
- 5) Menyelaraskan program-program pembangunan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- 6) Melibatkan masyarakat dalam membuat suatu rencana dan keputusan.

Dalam konteks pembangunan, Huraerah (2008:118) mengemukakan bahwa partisipasi dapat dibangkitkan melalui cara memberikan stimulasi kepada masyarakat melalui proyek-proyek

pembangunan dan memberikan pendidikan secara terus-menerus untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pembangunan. Masyarakat harus diberikan kebebasan dan tanpa tekanan serta paksaan untuk ikut ambil bagian dalam proses pembangunan wilayah.

Uraian pendapat yang dikemukakan oleh Abdulkarim dan Huraerah tersebut sebenarnya memiliki suatu kesamaan, untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan motivasi pada masyarakat akan pentingnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta mempercayai masyarakat untuk terlibat dalam suatu rencana dan pengambilan keputusan agar selaras antara keinginan pemerintah dan masyarakat.

## **2. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)**

### **a. Pengertian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong menjelaskan bahwa pengertian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah sebagai berikut: Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

Selain itu, terdapat pengertian lain tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat (10) yang menyatakan bahwa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian Bulan Bhakti Gotong Royong menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Walikota Semarang tersebut tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil pembangunan.

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari departemen, lembaga pemerintah non departemen. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti; Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Sebutan Lain.

**b. Pengorganisasian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)**

Pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pasal 5 s.d pasal 9. Pasal 5 terdapat dua ayat, yaitu 1) Pemerintah membentuk Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang anggotanya terdiri dari departemen, lembaga pemerintah non departemen, Dunia Usaha, LSM, dan unsur-unsur terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan 2) Pemerintah mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Lebih lanjut pada Pasal 6 terdapat dua ayat pula, yaitu 1) Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat provinsi yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi dan instansi terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan 2) Pemerintah Provinsi mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Pada tingkat Kabupaten/Kota pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) diatur pada Pasal 7 yang terdiri atas dua ayat, yaitu 1) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten dan Kota yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten dan kota serta instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan Gotong Royong Masyarakat; dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Lebih lanjut pada tingkat Kecamatan di Pasal 8 yang terdiri atas dua ayat telah diatur bahwa 1) Camat membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat kecamatan; dan 2) Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Sementara pada tingkat Desa/Kelurahan diatur pada Pasal 9 yang terdiri atas dua ayat yaitu 1) Pemerintah Desa dan Kelurahan membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

desa dan kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan desa dan kelurahan, KPM, LSM, tokoh masyarakat desa/kelurahan; dan Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa/kelurahan melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat.

Dalam mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 5 s.d Pasal 7 yang menyebutkan terkait Pengorganisasian dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Pada tingkat Kota diatur dalam Pasal 5 yang terdiri atas dua ayat yaitu 1) Walikota membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota Semarang yang anggotanya terdiri dari unsur Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah, Dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan unsur-unsur terkait; dan 2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Di tingkat Kecamatan Pasal 6 yang terdiri atas tiga ayat telah mengatur yaitu 1) Camat membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan, yang anggotanya terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Lembaga



Kemasyarakatan yang aktif sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan; 2) Camat melaksanakan pendampingan/fasilitasi kepada Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), serta pengendalian selama pelaksanaan kegiatan; dan 3) Camat bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) kepada Walikota.

Lebih lanjut pada tingkat Kelurahan diatur dalam Pasal 7 ayat (1-3) yaitu, 1) Lurah membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kelurahan, yang anggotanya terdiri dari Pemerintah Kelurahan, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan dan Tokoh Masyarakat; 2) Lurah melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), serta melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan 3) Lurah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kepada Camat.

Selain terdapat pengorganisasian tim pelaksana, terdapat juga pembinaan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (1 dan 2). Pada ayat 1) dijelaskan bahwa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing; sementara ayat 2) menjelaskan bahwa: Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan sehari-hari.

Adapun monitoring, evaluasi dan pelaporan diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 Pasal 12 dan 13. Pada Pasal 12 menyatakan bahwa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. Sementara pada Pasal 13 dijelaskan bahwa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota, Camat, Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat secara berjenjang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM) dilakukan dari tingkat paling atas sampai dengan tingkat paling bawah, seperti RT/RW. Sementara pengendalian pelaksanaan; monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.

**c. Bidang-Bidang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)**

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat meliputi 4 (empat) bidang yaitu bidang kemasyarakatan; ekonomi; sosial budaya dan agama; serta lingkungan. Bidang-bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat (1-4).

- 1) Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi :  
penguatan sistem keamanan lingkungan; pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan; peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa dan Kelurahan; penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; penyuluhan tentang idiologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional; penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat; penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak; penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan

swadaya; kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

- 2) Kegiatan gotong royong dibidang ekonomi meliputi: penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat; fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat; fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam; pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat; pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, Iantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya); kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- 3) Kegiatan gotong royong dibidang sosial budaya dan agama meliputi: penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS); pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll); bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia; lomba kesehatan (seperti Lomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita sehat, dll); pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu); pembangunan dan

pemeliharaan sarana olahraga; perlombaan dan pertandingan olahraga; Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dll); perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya; pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

- 4) Kegiatan gotong royong dibidang Lingkungan meliputi: pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya); pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih; pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman; penyuluhan tentang kesehatan lingkungan; konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis; kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

Sebagai upaya untuk mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005, Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bidang-bidang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yaitu bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama, serta bidang lingkungan.

Berdasarkan kedua peraturan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 maupun Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2009

memiliki kesamaan yaitu kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang meliputi empat bidang, yaitu bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan.

## **B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan**

Penulis mengacu pada hasil-hasil penelitian terdahulu.

1. Karya Anggorowati dan Sarmini (2015) yang berjudul Pelaksanaan Gotong Royong di Era Global (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan). Hasil penelitian dalam tulisan tersebut adalah pelaksanaan gotong royong di Desa Balun berjalan dengan baik melalui kerjasama antara warga dan pemerintah desa. Gotong royong di desa Balun terbagi dalam dua bentuk meliputi gotong royong inter agama dan gotong royong intra agama. Pada gotong royong intra agama yang dilakukan hanya di dalam warga satu agama saja yaitu pada bidang sosial berkaitan dengan perawatan dan pembangunan tempat ibadah. Sedangkan untuk gotong royong inter agama dilaksanakan dalam dua bidang yaitu bidang ekonomi dan sosial. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempertahankan gotong royong mengandung dua unsur yaitu unsur sukarela dan unsur paksaan. Unsur paksaan pada gotong royong yaitu melalui adanya denda dan keplek absensi. Persamaan antara penelitian Anggorowati dan Sarmini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang gotong royong dengan menggunakan

metode kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada objek kajiannya. Penelitian Anggorowati dan Sarmini mengungkapkan tentang gotong royong pada masyarakat Desa Balun, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan mengungkapkan tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

2. Penelitian Deviyanti (2013) dengan judul Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah didapatkan beberapa temuan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Karang Jati belum optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat di dalam perencanaan tersebut. Realisasi pembangunan itu sendiri dilaksanakan oleh pihak pemerintah setempat tanpa adanya swadaya dari masyarakat terutama dalam bentuk materi (dana), masyarakat hanya memberikan swadaya dalam bentuk tenaga. Selain itu pemanfaatan pembangunan dapat dilihat dari hasil pembangunan yang ada di kelurahan karang jati ini sudah banyak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. Dan masyarakat juga ikut terlibat dalam mengawasi dan menilai hasil pembangunan tersebut. Selain itu untuk faktor yang mendukung masyarakat sebenarnya berada pada kemauan dari masyarakat itu sendiri, Sedangkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif di Kelurahan Karang Jati masih dihadapkan oleh berbagai hambatan baik

yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pihak pemerintah, pengetahuan masyarakat yang masih terbatas mengenai peran serta mereka dalam pembangunan dan ketersediaan waktu yang kurang untuk bisa ikut serta dalam kegiatan pembangunan karena adanya faktor kesibukan pekerjaan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian Deviyanti fokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Karang Jati, sementara penelitian yang akan penulis lakukan fokusnya pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Sampangan.

3. Skripsi Nurul Wahyu Lestari (2015) dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keaktifan Gotong Royong Melalui Kebun Desa Di Desa Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Hasil penelitiannya adalah bahwa peran kepala desa dalam Program Pembangunan Desa di Desa Mojosimo dalam memakmurkan warga dan juga menyalurkan hobi warga dalam bercocok tanam yaitu dengan adanya program kebun desa atau memanfaatkan lahan kosong. Hambatan Kepala Desa Mojosimo



dalam meningkatkan keaktifan gotong royong yaitu mengenai partisipasi warga desa, warga dalam memberikan partisipasi ada yang ikut aktif dalam gotong royong kerjabakti tetapi ada beberapa warga yang mengesampirkan kerjabakti dan memilih untuk bekerja, hambatan selanjutnya budaya malas, ada warga yang lebih memilih dirmah untuk tidur atau bepergian dibandingkan harus ikut kerjabakti, hambatan selanjutnya mengenai tanaman, tanaman yang ditanam tidakhanya mengandalkan pemberian dari dinas tetapi warga secara bergotong royong iuran untuk membeli bibit sendiri untuk ditanam dikebun. Kepala desa lebih sering mengadakan sosialisasi dengan warga mengenai arti penting hidup bergotong royong dalam pembangunan desa menuju desa yang makmur. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang gotong royong dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian Nurul Wahyu Lestari mengangkat gotong royong melalui kebun desa di Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti gotong Royong di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

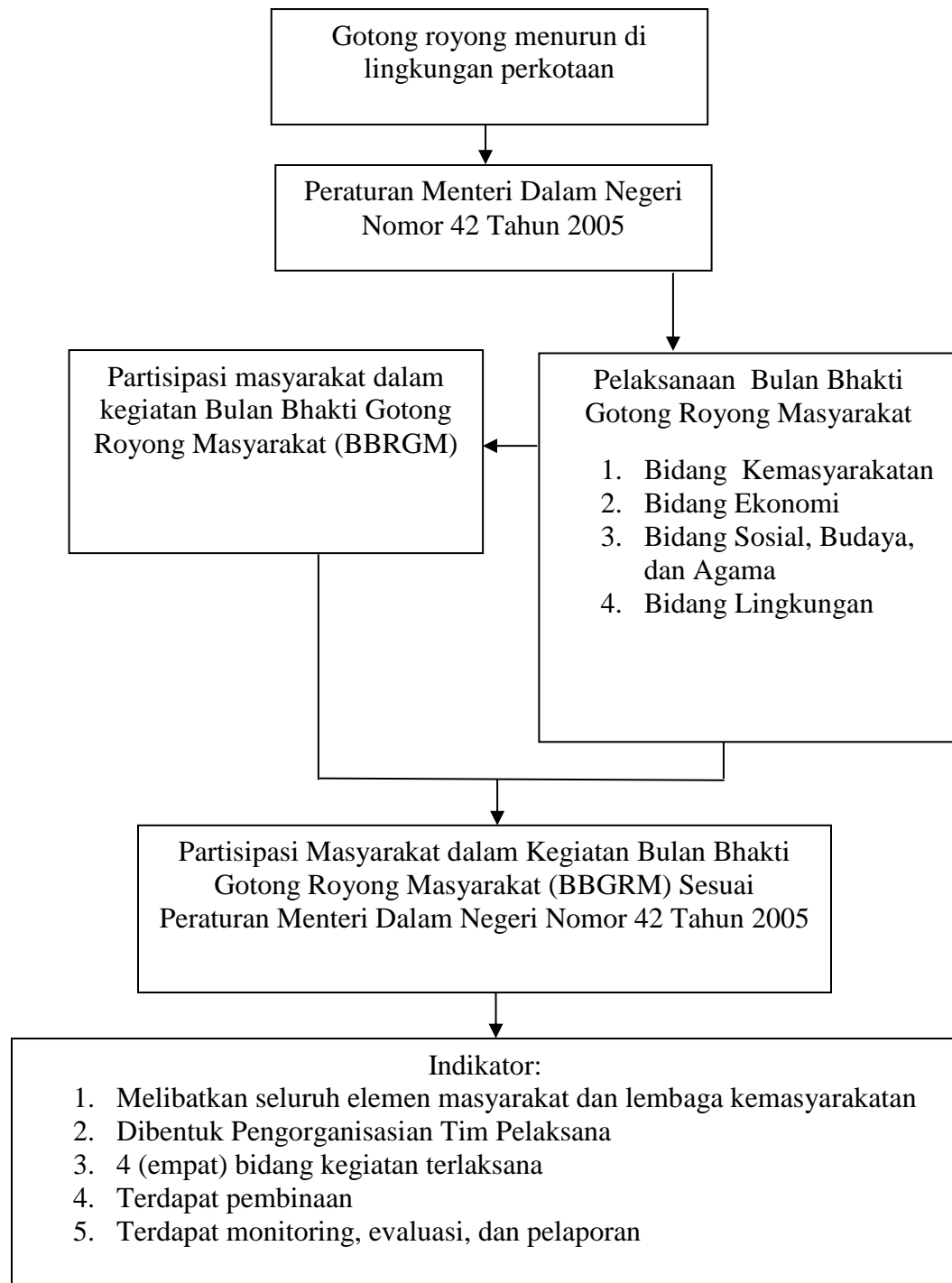
### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dalam penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai pemikiran penelitian. Hal ini perlu karena dapat mengarahkan pada alur dari penelitian, sehingga kerangka pikir ditarik berdasarkan suatu landasan konseptual, lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar dari pemecahan suatu masalah.

Kerangka pikir pada penelitian ini berawal dengan adanya suatu masalah yaitu, perubahan sosial sebagai dampak dari globalisasi yang menyebabkan nilai-nilai lama yang selama ini menjadi pegangan dan acuan dalam relasi sosial berbasis pada semangat dan nilai-nilai gotong royong mulai menurun. Masuknya pengaruh budaya luar yang sangat individual saat ini, rasa kebersamaan dan gotong-royong semakin memudar, kepekaan sosial mulai berkurang, tegur sapa dan bercengkrama serta kesadaran saling membantu sudah mulai luntur. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2005 menginstruksikan kepada seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia untuk menyelenggarakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Dengan adanya partisipasi masyarakat, rencana program yang disusun akan lebih terarah dan disusun sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang mengacu pada empat bidang

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2005 dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Bulan Bhakti gotong royong Masyarakat (BBGRM). Empat bidang tersebut adalah bidang kemasyarakatan; bidang ekonomi; bidang sosial, budaya, dan agama; serta bidang lingkungan. Sehingga nantinya akan dapatkan hasil partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2005. Indikator yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; dibentuk pengorganisasian tim pelaksana; 4 (empat) bidang kegiatan terlaksana; terdapat pembinaan. Berikut adalah bagan kerangka pikir dalam penelitian ini.



**Bagan 2.1.** Kerangka Pikir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan terkait Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin di bawah ini.

1. Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang memiliki 5 (lima) alur. Alur pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yaitu, 1) adanya pengorganisasian tim pelaksana yang dipegang oleh LPMK; 2) terdapat persiapan yang diwujudkan dengan adanya Musrenbagkel sebagai hasil musyawarah dari masyarakat mulai dari tingkat RT sampai dengan Kelurahan; 3) pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh masing-masing tingkatan kegiatan, baik itu kegiatan pada tingkatan RT, RW, maupun tingkat Kelurahan; 4) di sela-sela pelaksanaan kegiatan pada 4 (empat) bidang terdapat pembinaan pengendalian pelaksanaan kegiatan dari pemerintah kelurahan yaitu dibina langsung oleh Lurah dan LPMK pada saat Rakor (Rapat Koordinasi); 5) terdapat monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilakukan tidak secara khusus. Pelaksanaan kegiatan

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005. Pada saat tidak mengikuti lomba, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tidak dilakukan secara berjenjang ditingkat kecamatan maupun kota.

2. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sudah baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk sudah berhasil dilaksanakan. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan dengan cara ikut serta dalam proses Musrenbangkel dalam bentuk sumbangsih ide gagasan. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pada saat proses Musrenbangkel. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dapat berupa tenaga, uang, maupun alat kerja yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing masyarakat. Pada tahap pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat diwujudkan dengan cara mengadakan kerja bakti untuk merawat dan mengelola hasil-hasil kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan hasil dapat berupa tenaga, uang, dan alat kerja. Pada tahap evaluasi, partisipasi masyarakat diwujudkan dengan cara evaluasi pada

tingkat RT terkait kekurangan dan kelebihan dari kegiatan yang telah terlaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya yaitu, keteladanan dari pengurus, komunikasi, sanksi sosial, usia, dan kerukunan/kebersamaan. Sementara itu, upaya untuk membangkitkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Sampangan adalah mensosialisasikan program yang ada di Kelurahan lewat kelembagaan terutama RT, RW, PKK, FKK, Karang Taruna, dan elemen kemasyarakatan lainnya; menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan; Pemerintah Kelurahan Sampangan sebagai fasilitator memfasilitasi dana; serta memotivasi dan mengarahkan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan RT, RW atau dalam pertemuan Kelurahan untuk selalu berpartisipasi aktif.

## **B. Saran**

Adapun beberapa masukan atau saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian sebagai berikut.

### **1. Aparatur Kelurahan Sampangan**

- a. Pemerintah Kelurahan Sampangan lebih berkoordinasi dengan Pemerintah Kota terkait pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Sampangan dengan memberdayakan elemen-elemen kemasyarakatan

yang ada seperti, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dll untuk mengajak masyarakat lebih aktif dalam berpartisipasi.

- b. Pemerintah Kelurahan Sampangan dapat menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan persuasif/personal agar sebagian masyarakat yang belum aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dapat berpartisipasi dengan maksimal.

## 2. Pemerintah Kota Semarang

Sebaiknya pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tetap diberikan kepada semua kelurahan yang ada di Kota Semarang meskipun kelurahan tersebut tidak mengikuti lomba. Sehingga, masyarakat akan lebih terpacu untuk meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan gotong royong.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkarim, Aim. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Alfianika, Ninit. 2018. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Conyers, Diana.1992. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dewantara, Agustinus W. 2017. *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno)*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hajar, Siti., Dkk. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Helaluddin., dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar.
- Huraerah, Abu. 2008. *PENGGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Lubis, Mayang Sari. 2018. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama.
- Mardikanto, Totok., Poerwoko Soebiato. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas sosial dan partisipasi Masyarakat desa Transisi, suatu tinjauan sosiologis*. Surabaya: UMM Press.
- Narbuko, Cholid., Dkk. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: UNNES Press.
- Sastropoetro. R.A.S.. 1998. *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwan, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2015. *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

#### **Jurnal, Skripsi, dan Tesis**

- Akadun. 2011. Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal MIMBAR*, Vol. XXVII, No. 2, Thn. 2011, Hal: 183-191.
- Anggorowati, Puput., dan Sarmini. 2015. Pelaksanaan Gotong Royong Di Era Global (Studi Kasus Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Volume 01, Nomor 03, Tahun 2015, Hal 39-53.
- Corynata, Isma. 2012. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 12, No. 2, Tahun 2012, Hal: 110-125.
- Chusnah, Ummul. 2008. Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Di SMA Negeri 1 Surakarta. *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Deviyanti, Dea. 2013. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *eJournal Administrasi Negara*, 2013, 1 (2): 380-394.
- Lestari, Nurul Wahyu. 2015. Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keaktifan Gotong Royong Melalui Kebun Desa Di Desa Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Nawawi, Ahmad. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretetek Paragtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2013, Hlm. 103-109.

- Putra, Ardha Andika. 2018. Partisipasi Masyarakat di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dalam Mengembangkan Desa Wisata sebagai Bentuk Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Rendi, Ahmad. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Bergotong Royong Di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 2017, 5 (4): 175-189.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotoong Royong Masyarakat (BBGRM) Kota Semarang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.